



Media: Merapi

Hari: Senin

Tanggal: 16 Juli 2018

Halaman: 1

Pelatihan Minim, Kelurahan Kebingungan

PELAYANAN publik pemerintah melalui aplikasi teknologi informasi membutuhkan respons cepat dari pegawai negeri sipil yang menjalankannya. Semakin cepat aduan warga direspons, semakin cepat berkembang aplikasi itu diterapkan.

Hanya saja, belum semua perangkat di setiap level instansi mendapat petunjuk teknis dan pelatihan agar dapat merespons aduan tersebut. Alih-alih dituntut respons cepat, yang terjadi perangkat wilayah justru kebingungan.

** Bersambung ke halaman 9*

Pelatihan

Lurah Pandeyan Umbulharjo Yogyakarta, Sulasmi mengutarakan, kelurahan siap mendukung program JSS tersebut. Tapi untuk mendukung itu diperlukan pemahaman prosedur teknis dan operasional mengenai aplikasi itu. Terutama untuk menindaklanjuti aduan maupun layanan yang diakses masyarakat yang menjadi kewenangan kelurahan.

"Secara umum SDM di kelurahan sudah mampu menggunakan teknologi informasi. Tapi untuk JSS ini perlu ada pelatihan kaitannya tindak lanjut teknis yang menjadi kewenangan wilayah. Bagaimana mengetahui jika ada laporan maupun aduan dan responnya," kata Sulasmi kepada *Merapi*, Kamis (12/7).

Dia sendiri sudah mengunduh aplikasi JSS itu dan memantau aduan dari masyarakat. Tapi menurutnya sejauh ini belum ada aduan yang menyangkut langsung kewenangan kelurahan. Termasuk sejauh mana layanan di kelurahan yang diakses melalui JSS dia belum bisa mengetahuinya. Layanan publik di tingkat kelurahan misalnya untuk perizinan sebatas rekomendasi.

Sementara itu Camat Umbulharjo, Mardjuki menyampaikan pelayanan publik di kecamatan sudah bisa diakses melalui aplikasi JSS. Misalnya pelayanan perizinan pondokan. Namun diakuinya belum banyak masyarakat yang memanfaatkannya dan masih banyak yang datang langsung ke kecamatan.

"Memang ada aduan seperti sampah menumpuk dan jalan berlubang di wilayah kerja di Umbulharjo. Tapi itu menjadi kewenangan dinas terkait. Kami di camat sebatas pelayanan kecamatan," papar Mardjuki yang mengakui sejauh ini tidak ada kendala dalam penerapan JSS di tingkat kecamatan.

Sosialisasi Minim

Di sisi lain, sejak diturunkan awal lalu, hingga Minggu (15/7) pagi, aplikasi Laport Bantul baru diunduh sebanyak 500 kali. Meski begitu sudah terdapat sejumlah keluhan dari masyarakat di antaranya terkait kejadian darurat maupun pertanyaan seputar proses dokumen kependudukan.

"Di Diskominfo kami ada dua petugas yang secara intensif pada bagian IT dan Administrasinya, dan di setiap OPD sudah ada operator khusus," kata Kepala Diskominfo Bantul, Nugroho Eko Setyanto.

Salah seorang warga, Agus Priyanto, aplikasi ini cukup membantu. Namun menurutnya respons yang dilakukan belum optimal. Dari laporan yang masuk dalam aplikasi itu pihaknya belum banyak melihat ada jawaban dari OPD. Sehingga Agus masih menunggu adanya perkembangan aplikasi ini menjadi lebih responsif. "Jangan ha-

..... Sambungan halaman 1

nya asal ada, tapi harus efektif," tegas salah satu anggota Ikatan Mahasiswa Bantul ini.

Agus menambahkan, awalnya sempat ragu untuk membuat laporan karena masih berharap identitasnya bisa dirahasiakan.

Karena menurutnya banyak pula masyarakat yang takut melapor apalagi terkait dengan pelayanan secara personal dari aparat sipil negara atau PNS.

Ditambah lagi, mahasiswa perguruan tinggi negeri di Yogya ini berharap, sosialisasi kepada masyarakat terkait tersedianya aplikasi Laport Bantul ini lebih digencarkan. Karena menurutnya belum banyak masyarakat yang mengetahui.

"Belum lagi kalau yang tua-tua di desa atau kampung tidak punya handphone ya sama saja tidak bisa menggunakan," imbuhnya.

Instansi	Nilai Berita	Sifat
1. <i>Diskominfosan</i>	<input type="checkbox"/> Negatif	<input type="checkbox"/> Amat Segera
2. <i>Kec. Umbulharjo</i>	<input type="checkbox"/> Positif	<input checked="" type="checkbox"/> Segera
3. <i>Kel. Pandeyan</i>	<input checked="" type="checkbox"/> Netral	<input type="checkbox"/> Biasa
4.		
5.		

✓ *Untuk diketahui*

Yogy

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Kecamatan/Kemantren Umbulharjo	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Kelurahan Pandeyan			
3. Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian			

Yogyakarta, 16 Desember 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005